

PENERAPAN PSAK NO. 30 TENTANG AKUNTANSI LEASING AKTIVA TETAP PADA PT BUMI SARANA BETON

Muhammad Idrus

(Dosen Universitas Negeri Makassar)

Abstrak. Kegiatan leasing ini sangat bervariasi menurut kontraknya, variabel-variabel itu misalnya lama masa penyewaan, persyaratan pembayaran, dan pembelian, ayat-ayat mengenai pembatalan dan sanksi-sanksi, jaminan oleh penyewa mengenai nilai sisa, jumlah dan waktu pembayaran biaya-biaya tertentu seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat dalam transaksi leasing ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian menggunakan metode dokumentasi dengan objek penelitian pada PT Bumi Sarana Beton Kota Makassar
Hasil penelitian

Kata Kunci : PSAK No. 30, Leasing, Akuntansi Leasing, Aktiva Tetap

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada kondisi yang ada pada masyarakat itu sendiri, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan, karena pada hakikatnya perluasan usaha membutuhkan pembiayaan dana dan peralatan modal yang besar. Dalam hal pembiayaan dana, selain melalui pihak perbankan dan lembaga keuangan non bank, dikenal pula sistem pembiayaan alternatif lainnya, yakni sistem “leasing”.

Kegiatan *leasing* ini sangat bervariasi menurut kontraknya, variabel-variabel itu misalnya lama masa penyewaan, persyaratan pembayaran, dan pembelian, ayat-ayat mengenai pembatalan dan sanksi-sanksi, jaminan oleh penyewa mengenai nilai sisa, jumlah dan waktu pembayaran biaya-biaya tertentu seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat dalam transaksi *leasing* ini.

Leasing merupakan perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan properti, pabrik, atau peralatan, biasanya dalam periode waktu yang ditetapkan. *Leasing* dapat diartikan pula sebagai kontrak untuk menggunakan dengan imbalan antara pemilik properti (*lessor*) dan penyewa (*lessee*). *Leasing* ini menetapkan persyaratan yang menyatakan bahwa *lessee* mempunyai hak untuk menggunakan properti *lessor* dengan

kompensasi yang harus dibayarkan kepada *lessor* sebagai imbalannya. Properti yang di-*leasing* dapat meliputi aktiva tetap (*real*) maupun bergerak (*personal*), properti bergerak meliputi aktiva berwujud (seperti mesin, peralatan, atau alat transportasi, dan aktiva tidak berwujud tertentu seperti hak paten) (Dyckman dkk, 2002:302).

Perusahaan sebagai organisasi modern yang memiliki kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang dibebankan kepadanya. Selain mencari laba, tujuan lain perusahaan yaitu menginginkan pertumbuhan yang terus-menerus, kelangsungan hidup, dan guna mendapatkan kesan positif di mata publik. Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen sebagai pihak yang diserahi tanggung jawab memiliki atau menguasai faktor-faktor produksi. Proses ini dimaksudkan untuk menghasilkan penerimaan kas melalui penjualan produksi tersebut yang menjadi salah satu sumber dana utama bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Untuk menghasilkan produk ini maka peranan aktiva tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik, atau kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi kendaraan sebagai alat transportasi maupun untuk mengangkut hasil produksi, serta inventaris seperti meja, kursi, lemari dan lain-lain sebagai alat pendukung kegiatan perusahaan.

Dalam rangka pengembangan perusahaan, biasanya perusahaan akan selalu berusaha untuk mengganti aktiva yang lama dengan aktiva yang baru. Penggantian atas aktiva tetap ini mungkin disebabkan karena aktiva tetap tersebut telah habis masa umur ekonomisnya atau karena rusak dan tidak dapat lagi digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan disisi lain, kegiatan operasional perusahaan menuntut adanya pengadaan aktiva tetap yang baru. Pengadaan aktiva tetap ini dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam bentuk sewa guna usaha atau *leasing*. Penggunaan sewa guna usaha sebagai sarana mengalihkan hak untuk menggunakan suatu harta kepada pihak lain telah mengalami pertumbuhan yang pesat, hal ini disebabkan semakin bervariasinya jenis aktiva tetap yang dapat di-*leasing* diantaranya kendaraan, mesin, alat-alat berat, sampai dengan aset berteknologi canggih. Hadirnya perusahaan sewa guna usaha ini semakin mempopulerkan dan menambah kiprah kegiatan bisnis sewa guna usaha sebagai sumber pembiayaan lain disamping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan.

Sewa guna usaha di Indonesia diperkenalkan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 122/MK/IV/2/1979, Nomor 32/M/SK/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, yang pada saat itu kegiatan sewa guna usaha masih terbatas (Miharni, 2003). Dunia akuntansi melihat perkembangan sewa guna usaha yang pesat di Indonesia, sehingga diperlukan suatu acuan mengenai perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha tersebut secara khusus yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi sewa guna

usaha dalam laporan keuangan, sehingga dihasilkan suatu laporan keuangan yang wajar dan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Selain itu, perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa guna usaha perlu diterapkan secara konsisten mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30 tentang sewa guna usaha dalam rangka penyusunan laporan keuangan perusahaan.

PT Bumi Sarana Beton merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang dalam kegiatan usahanya melakukan sewa guna usaha (*leasing*) aktiva tetap dalam pengadaan alat-alat beratnya untuk menunjang aktivitas operasional. Permasalahan muncul ketika perlakuan dan beberapa pencatatan transaksi aktiva tetap yang di *lease* belum sesuai dengan PSAK No. 30 yaitu dalam penentuan masa sewa aktiva tetap dan pemisahan akun antara aktiva yang diperoleh dari kegiatan *leasing* dan yang bukan dari kegiatan *leasing*. Hal ini menjadi fokus dalam penelitian ini, apakah praktik yang dilakukan oleh PT Bumi Sarana Beton sesuai dengan penerapan PSAK No. 30 tentang akuntansi *leasing* aktiva tetap pada pencatatan dan pengakuan atas transaksi yang dilakukan secara *leasing* tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian yang diberi judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 30 tentang Akuntansi Leasing Aktiva Tetap pada PT Bumi Sarana Beton**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang ingin dipecahkan, yaitu: “Bagaimana penerapan akuntansi *leasing* yang digunakan oleh PT Bumi Sarana Beton?”

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi *leasing* yang di gunakan oleh PT Bumi Sarana Beton”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan pertimbangan bagi PT Bumi Sarana Beton dalam menerapkan akuntansi *leasing* aktiva tetap berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- b) Sebagai sarana informasi bagi masyarakat bahwa semua kegiatan pencatatan akuntansi perusahaan diatur dalam PSAK.

2. Manfaat Teoritis

- a) Bagi civitas akademika Universitas Negeri Makassar, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi beberapa penelitian dengan objek peneliti yang sejenis.
- b) Bagi penulis dan para pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas khasanah keilmuan khususnya ilmu akuntansi *leasing* aktiva tetap.

Landasan Teori

Aktiva Tetap

a. Definisi Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva bernilai besar yang sifatnya tetap atau permanen, digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal (Soemarso, 2004:233). Aktiva tetap adalah aktiva yang menjadi hak milik perusahaan dan dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa perusahaan (Harahap, 2002:20)

Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal (Baridwan, 2004:271). Sedangkan aset tetap didefinisikan dalam PSAK No. 16 sebagai aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (paragraph 6).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang sifatnya permanen dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti kegiatan produksi, penjualan barang, penjualan aktiva lain, atau pembelian aktiva lainnya, dengan maksud tidak untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan normal perusahaan.

b. Penggolongan Aktiva Tetap

Harahap (2002:22) mengelompokkan aktiva tetap dalam berbagai sudut:

a. Sudut substansi, aktiva tetap dapat dibagi:

1. *Tangible assetss* atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan.
2. *Intangible assets* atau aktiva tidak berwujud seperti *goodwill-patents, copyright*, hak cipta, *franchise*, dan lain-lain.

b. Sudut disusutkan atau tidak, aktiva tetap dapat dibagi:

1. *Depreciated plants assets*, yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti *building* (bangunan), *equipment* (peralatan), *machinary* (mesin), inventaris, jalan, dan lain-lain.
2. *Undepreciated plants assets*, aktiva tetap yang tidak disusutkan seperti *land* (lahan).

c. Berdasarkan jenis, aktiva tetap berdasarkan jenis dapat dibagi sebagai berikut:

1. Lahan
Lahan adalah sebidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong.
2. Bangunan Gedung

Gedung adalah bangunan yang berdiri diatas bumi ini baik diatas lahan/air. Pencatatan harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu.

3. Mesin

Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan.

4. Kendaraan

Semua jenis kendaraan seperti, alat pengangkutan, *truck, grader, tractor, forklift*, mobil, kendaraan roda dua, dan lain-lain.

5. Perabot

Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan.

6. Inventaris/peralatan

Peralatan yang digunakan merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain.

7. Prasarana

Di Indonesia adalah merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, *riol*, pagar, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Baridwan (2004:272) dari macam-macam aktiva tetap berwujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokkan sebagai berikut:

- a. Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan.
- b. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain.
- c. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

c. Penyusutan (*Depreciation*)

Aktiva yang umurnya tidak terbatas tidak dilakukan penyusutan terhadap harga perolehannya, sedangkan aktiva tetap yang terbatas umurnya dilakukan penyusutan harga perolehannya. Aktiva tetap yang dapat diganti dengan aktiva yang sejenis penyusutannya di sebut depresiasi, sedangkan penyusutan sumber alam disebut depleksi.

Penyusutan atau depresiasi merupakan pengalokasian harga pokok aktiva tetap selama masa penggunaannya atau dapat juga kita sebut sebagai biaya yang dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aktiva tetap itu dalam proses produksi (Harahap, 2002:53). Depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi (Baridwan, 2004:305). Sedangkan penyusutan (depresiasi) didefinisikan dalam PSAK No. 16

sebagai alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset sepanjang masa manfaatnya (paragraf 6).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan beban penyusutan, terdapat tiga faktor yang harus dipertimbangkan adalah (a) jumlah yang dapat disusutkan, (b) estimasi umur manfaat, (c) metode alokasi.

d. Metode Perhitungan Depresiasi

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban depresiasi periodik. Untuk dapat memilih salah satu metode hendaknya dipertimbangkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi aktiva tersebut. Metode-metode tersebut adalah :

- a. Metode garis lurus (*straight-line method*)
- b. Metode jam jasa (*service-hours method*)
- c. Metode hasil produksi (*productive-output method*)
- d. Metode beban berkurang (*redicing-charge method*)
 1. Jumlah angka tahun (*sum of years-digits method*)
 2. Saldo menurun (*declining balance method*)
 3. *Double declining balance method*
 4. Tarif menurun (*declining rate on cost method*)

2.Akuntansi Leasing

a. Definisi Akuntansi Leasing

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Sewa Guna Usaha atau sering disingkat SGU adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (*financial lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Leasing merupakan perjanjian kontraktual antara *lessor* dan *lessee* yang memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan properti tertentu, yang dimiliki oleh *lessor*, selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang (sewa) yang sudah ditentukan, yang umumnya dilakukan secara periodik. (Kieso, dkk, 2002:232). Sedangkan *leasing* menurut Harahap (2002:170) adalah suatu cara untuk memperoleh hak untuk menggunakan aktiva berwujud tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

b. Klasifikasi Sewa Guna Usaha

Klasifikasi sewa yang digunakan dalam PSAK No. 30 didasarkan atas sejauh mana resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee* (paragraf 7). Untuk tujuan akuntansi, PSAK No. 30 membagi sewa ke dalam dua kategori utama (paragraf 8), yaitu:

a. Sewa operasi (*operational lease*)

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

b. Sewa pembiayaan (*capital lease*)

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, tanpa memandang bentuk legalnya, jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

PSAK No. 30 memberikan contoh situasi yang mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan sebagai berikut (paragraf 10).

- a. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa.
- b. Sewa mengandung opsi pembelian aset.
- c. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset.
- d. Nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum (tidak termasuk biaya pelaksanaan) secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan.
- e. Aset sewaan bersifat khusus sehingga hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.

PSAK No. 30 lebih jauh menyebutkan indikator dari situasi yang secara individual atau gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah (paragraf 11):

- a. Jika *lessee* dapat membatalkan sewa, maka rugi *lessor* yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh *lessee*.
- b. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar nilai residu dibebankan kepada *lessee*;
- c. *Lessee* memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental.

Menurut Samudra (2008:19) terdapat beberapa jenis *leasing* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan luas bidang *lease*, adalah sebagai berikut:

a. *Financial lease*

Perusahaan sewa guna usaha dalam pihak yang membayai penyediaan barang modal.

b. *Operating Lease*

Dalam sewa guna usaha jenis ini, *lessor* membeli barang modal kemudian menyewakannya pada *lessee* dengan jangka waktu tertentu. Jumlah pembayaran berkala secara keseluruhan tidak akan melebihi atau tidak menutupi harga perolehan barang modal dan biaya yang dikeluarkan. Hal ini diakibatkan oleh periode *lease* yang pendek dan apabila periode *lease* berakhir, maka *lessor* akan memperpanjang *lease* dengan *lessee* yang sama atau membuat perjanjian baru dengan *lessee* yang lain.

Pada *operating lease*, *lessor* bertanggung jawab atas perawatan barang yang disewakan, dalam hal ini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*, sehingga tidak terdapat pemindahan kepemilikan.

c. *Sales Type Lease*

Sewa guna usaha jenis ini merupakan *financial lease*, tetapi dalam hal ini barang modal yang disewakan pada saat awal masa sewa guna usaha mempunyai nilai yang berbeda dengan biaya atau *cost* yang dtanggung oleh *lessor*. Sewa guna usaha ini merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu.

d. *Leverage Lease*

Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak yakni penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha dan kreditur jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha.

Ditinjau dari teknis pelaksanaan transaksi sewa guna usaha, jenis sewa guna usaha menurut Samudra (2008:19) adalah sebagai berikut :

a. Sewa Guna Usaha Langsung (*Direct Lease*)

Dalam transaksi jenis ini penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek sewa guna usaha sehingga atas permintaannya perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal tersebut.

b. Penjualan dan Penyewaan Kembali (*Sale and Leaseback*)

Dalam transaksi ini, *lessee* terlebih dulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada perusahaan, dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara *lessee* (pemilik semula) dengan *lessor* (pembeli barang modal).

c. Sewa Guna Usaha Sindikasi (*Syndicated Lease*)

Dalam sewa guna usaha sindikasi perusahaan sewa guna usaha secara bersama melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha. Sewa guna usaha ini dilakukan karena nilai transaksi yang besar atau karena faktor-faktor lain.

c. Ketentuan *Leasing*

Menurut Kieso, dkk (2002:235), ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh *lessor* dan *lessee* bisa sangat bervariasi, antara lain:

a. Durasi (masa *lease*), *lease* mungkin terjadi untuk periode waktu yang pendek sampai sepanjang perkiraan umur ekonomis aktiva yang disewa guna usahakan.

b. Pembayaran sewa, dimana pembayaran ditentukan sebelumnya atau bervariasi mengikuti penjualan, tingkat bunga utama, indeks harga konsumen, dalam kebanyakan kasus sewa ditetapkan agar memungkinkan *lessor* memperoleh kembali harga beli aktiva ditambah suatu hasil pengembalian yang wajar sepanjang umur *lease*.

c. Kewajiban pajak, asuransi dan pemeliharaan (biaya pelaksanaan), bisa ditanggung oleh *lessor* atau *lessee* atau bisa dibagi antara keduanya.

- d. Batasan-batasan. Kontrak *lease* bisa bersifat tidak dapat dibatalkan atau mungkin memberikan hak untuk menyelesaikan sebelum waktunya pembayaran atas skala harga tertentu ditambah denda atau hukuman. Dalam hal lalai, *lessee* mungkin harus melunasi seluruh pembayaran untuk masa yang akan datang dengan menerima hak milik atas harta sebagai gantinya atau *lessor* berhak untuk menjual kepada pihak ketiga dan menagih dari *lessee* seluruh atau sebagian dari selisih antara harga jual *lessor* yang belum diperoleh kembali.
- e. Alternatif bagi *lessee* saat selesainya *lease*, dapat berkisar dari tidak ada alternatif sampai hak untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga pasar wajar atau hak untuk memperbaharui atau membeli dengan harga nominal.

d. Keunggulan dan Kelemahan Leasing

Menurut Dyckman, dkk (2000:307) keunggulan *leasing* adalah sebagai berikut:

- a. *Leasing* dapat memecahkan masalah kas *lessee* dengan menyediakan pembiayaan sampai 100% nilai aktiva yang dilease.
- b. Transaksi *leasing* dapat disusun sebagai *lease* operasi, yang memberikan pembiayaan di luar neraca yang tidak tunduk pada batasan ikatan hutang.
- c. Dalam kasus peralatan industri yang mungkin harus dibuat dengan pesanan dan dapat meminta penundaan yang lama selama masa implementasi aktiva, *leasing* peralatan siap pakai biasa jadi menarik.
- d. *Leasing* memungkinkan *lessee* tidak perlu memiliki aktiva yang diperlukan hanya sementara, musiman, atau sekali-sekali.
- e. *Leasing* aktiva untuk periode *lease* yang relatif singkat, dan bukan memiliki aktiva, memberikan perlindungan bagi *lessee* dari keusangan peralatan.
- f. *Leasing* dapat memberikan keuntungan pajak penghasilan yang disebabkan oleh penyusuan dipercepat dan beban bunga.
- g. Secara umum jadwal pembayaran *lease* dapat diatur agar sesuai dengan arus kas masuk *lessee* yang diharapkan dari operasi.

3. Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha bagi perusahaan

a. Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha *Operating Lease*

1) Perlakuan Akuntansi oleh *Lessee*

Dalam pembukuan *lessee*, PSAK No. 30 mensyaratkan bahwa pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif (paragraf 33). Contoh transaksi dengan metode *operating lease* yaitu:

Diasumsikan bahwa PT A menyewa sebuah mobil selama 3 bulan dari tanggal 1 November 20X1 hingga 31 Januari 20X2 dengan pembayaran bulanan sebesar Rp 2 juta.

Cukup jelas bahwa sewa ini akan di klasifikasikan sebagai sewa operasi. Oleh karena merupakan sewa operasi, yang wajib diperhitungkan dalam buku PT A (*lessee*) adalah pembayaran sewa berkala. Dengan asumsi

bahwa tahun buku PT A berakhir pada tanggal 31 Desember, biaya rental Rp 4 juta akan dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif tahun 20X1 dan biaya rental Rp 2 juta dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif tahun 20X2.

PSAK No. 30 lebih lanjut mensyaratkan bahwa beban ke laporan laba rugi komprehensif diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat asset yang dinikmati pengguna (paragraf 33). Dengan demikian, jumlah yang diakui bisa tidak sama dengan jumlah yang dibayarkan untuk setiap periode akuntansi. Hal ini demi menjamin prinsip penandingan yang memadai.

Diasumsikan bahwa PT B menyewa ruangan kantor selama 15 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Oktober 20X1. Menurut syarat perjanjian sewa, tidak ada pembayaran sewa untuk tiga bulan pertama, namun pembayaran sewa bulanan sebesar Rp 5 juta harus dibayar untuk setiap bulan selama 12 bulan berikutnya.

Dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember, PT B tidak diperbolehkan mengakui pembayaran sewa yang dilakukan pada tahun 20X2 ke dalam laporan laba rugi komprehensif tahun 20X2. Oleh karena telah melakukan pembayaran sewa sejumlah Rp 60 juta (Rp 5 juta x 12 bulan) untuk menggunakan ruangan kantor selama 15 bulan, maka PT B seharusnya mengakui pembayaran sewa Rp 4 juta (Rp 60 juta/15 bulan) perbulan. Ini lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Dengan demikian, agar prinsip penandingan memadai, jumlah pembayaran sewa yang harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun 20X1 dan 20X2 masing-masing adalah Rp 12 juta (Rp 4 juta x 3 bulan) dan Rp 48 juta (Rp 4 juta x 12 bulan).

b. Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha *Capital Lease*

Dalam sewa pembiayaan, prosedur akuntansinya adalah sebagai berikut:

- 1) Aset sewaan diperlakukan seolah-olah aset itu telah dijual kepada *lessee*. Aset itu pun dicatat sebagai aset tetap dalam pembukuan *lessee*.
- 2) Fasilitas pembiayaan terkait dicatat sebagai liabilitas (utang sewa) dalam pembukuan *lessee*, dan sebagai aset (piutang sewa) dalam pembukuan *lessor*.
- 3) Pembayaran sewa berkala dihitung agar mencakup beban/pendapatan keuangan dan pelunasan kewajiban. Oleh karenanya, pembayaran sewa berkala harus dipisahkan menjadi bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban kemudian dicatat sesuai dengan pembukuan *lessee* maupun *lessor*.

1) Perlakuan Akuntansi oleh *lessee*

PSAK No. 30 mensyaratkan bahwa aset sewa pembiayaan dicatat sebagai aset tetap dalam pembukuan *lessee*.

Jumlah yang dikapitalisasi adalah nilai wajar aset pada awal masa sewa atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar (paragraf 19).

Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat bunga implisit dalam sewa. Namun, jika tingkat bunga implisit tidak dapat ditentukan secara praktis, maka tingkat bunga pinjaman inkremental *lessee* digunakan sebagai faktor diskonto (paragraf 19).

Aset sewaan dalam sewa pembiayaan yang dicatat sebagai aset tetap dalam pembukuan *lessee* harus diperlakukan sesuai dengan PSAK No. 16 dan kebijakan akuntansi serupa yang digunakan untuk memperhitungkan aset tetap lain yang sifatnya sama.

Aset sewaan harus disusutkan selama umur manfaatnya jika *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa. Jika tidak, aset itu harus disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa atau umur manfaatnya (paragraf 27).

PSAK No. 30 juga mensyaratkan bahwa *lessee* mencatat kewajiban yang timbul dari sewa pembiayaan dalam jumlah yang sama dengan aset sewaan (paragraf 27).

Untuk pembayaran sewa berkala, PSAK No. 30 mensyaratkan bahwa pembayaran harus dipisahkan menjadi bagian yang merupakan pelunasan liabilitas (paragraf 24).

Pada umumnya, beban bunga harus dialokasikan menggunakan “metode suku bunga efektif” agar menghasilkan suku bunga periodik konstan untuk sisa liabilitas pada setiap periode selama masa sewa (paragraf 24). Dalam praktiknya, beberapa aproksimasi (mialnya jumlah angka tahun atau metode garis lurus dapat pula digunakan (paragraf 26).

Dengan demikian, dalam sewa pembiayaan, *lessee* akan mencatat aset sewaan dan liabilitas terkait seolah-olah aset itu dibeli dengan fasilitas pembiayaan. pembayaran sewa berkala harus diperhitungkan sebagai pembayaran jumlah pokok dalam utang sewa dan juga pembayaran beban bunga. Dapat dilihat bahwa dalam sewa pembiayaan, *lessee* mencatat dua unsure beban terkait sewa pembiayaan yaitu beban bunga dan beban penyusutan. Contoh ilustrasi metode *capital lease* adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Januari 20XI, PT ABC Trading melakukan perjanjian sewa untuk menyewa sebuah peralatan dari PT DEF Leasing. Dengan ketentuan pemberian opsi kepada PT ABC Trading untuk membeli peralatan itu pada akhir masa sewa empat tahun seharga Rp 1 juta, dan pada awal sewa pada tanggal 1 Januari 20XI, diestimasi bahwa nilai pasar wajar peralatan itu kira-kira Rp 5 juta setelah empat tahun penggunaan. Sedangkan biaya sewa sebesar Rp 10 juta per tahun oleh PT ABC pada tanggal 31 Desember selama empat tahun, terhitung mulai 31 Desember 20XI.

Dengan adanya opsi pembelian itu, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pembayaran sewa minimum pun ditambah dengan harga pelaksanaan menjadi Rp 41 juta. Selain itu, peralatan sewaan disusutkan selama lima tahun, bukan empat tahun. Perhitungan yang relevan ditunjukkan sebagai berikut:

- a) Perhitungan nilai kini pembayaran sewa minimum:

Pembayaran sewa minimum:

Anuitas biasa sebesar Rp 10 juta untuk empat periode ditambah Rp 1 juta diakhir periode keempat = Rp 41 juta

Tingkat diskonto: 5 %

Nilai kini: Rp 10 juta x 3,5459 + Rp 1 juta x 0,8227 = Rp 36.282.000

Peralatan sewaan dikapitalisasi dan liabilitas terkait dicatat dalam pembukuan PT ABC Trading sebesar Rp 36.282.000 (nilai kini pembayaran sewa minimum Rp 36.282.000 lebih rendah dari nilai wajar Rp 41.000.000)

- b) Beban penyusutan peralatan sewaan adalah sebesar Rp 7.256.400 (Rp 36.282.000/5 tahun) untuk setiap tahun dari 20X1 hingga 20X5.
 c) Skedul amortisasi beban keuangan Rp 4.718.000 (Rp 41.000.000 – Rp 36.282.000):

Tanggal	Pembayaran sewa Rp	Bunga Rp	Jumlah Pokok Rp	Liabilitas Sewa Rp
1/1/XI				32.282.000
31/12/XI	10.000.000	1.814.000	8.186.000	28.096.000
31/12/X2	10.000.000	1.405.000	8.595.000	19.501.000
31/12/X3	10.000.000	975.000	9.025.000	10.476.000
31/12/X4	10.000.000	524.000	9.476.000	1.000.000

Ayat jurnal untuk mencatat sewa setiap tahunnya selama empat tahun (dengan asumsi akhir tahun tanggal 31 Desember) adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
1/1/XI	Peralatan sewa Utang sewa (mencatat sewa pembiayaan)		36.282.000	36.282.000
31/12/XI	Utang sewa Beban bunga Kas (mencatat pembayaran sewa)		8.186.000 1.814.000	10.000.000

	Beban penyusutan Akumulasi penyusutan (mencatat beban penyusutan)		7.256.400	7.256.400
31/12/X2	Utang sewa Beban bunga Kas (mencatat pembayaran sewa)		8.595.000 1.405.000	10.000.000
	Beban penyusutan Akumulasi penyusutan (mencatat beban penyusutan)		7.256.400	7.256.400
31/12/X3	Utang sewa Beban bunga Kas (mencatat pembayaran sewa)		9.025.000 975.000	10.000.000
	Beban penyusutan Akumulasi penyusutan (mencatat beban penyusutan)		7.256.400	7.256.400
31/12/X4	Utang sewa Beban bunga Kas (mencatat pembayaran sewa)		9.476.000 524.000	10.000.000
	Beban penyusutan Akumulasi penyusutan (mencatat beban penyusutan)		7.256.400	7.256.400

Selain itu, dapat dilihat bahwa skedul amortisasi terdapat saldo utang sewa sebesar Rp 1 juta pada akhir sewa. Jumlah ini merupakan jumlah yang harus dibayar oleh *lessee luntuk* melaksanakan opsi pembelian. Ayat jurnal untuk mencatat pelaksanaan opsi pembelian pada tanggal 31 Desember 20X4 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31/12/X4	Utang sewa Kas (mencatat pelaksanaan opsi pembelian)		1.000.000	1.000.000

Dalam contoh ini, pada akhir sewa pada tanggal 31 Desember 20X4, meskipun liabilitas sewa telah dilunasi seluruhnya, aset sewaan masih memiliki saldo karena disusutkan selama lima tahun. Pada tanggal ini juga aste itu seharusnya sipindah ke aku aset tetap biasa.

4. Penelitian Terdahulu

Ria Dwiyanti Samudra. 2008. Universitas Brawijaya. Penerapan PSAK No.30 Mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Dan

Pengaruhnya Pada Neraca Dan Laporan Laba Rugi Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Nusantara).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan transaksi sewa guna usaha aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan bagaimana pengaruhnya pada laporan keuangan perusahaan khususnya pada Neraca dan Laporan laba rugi perusahaan. PT Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Untuk menunjang kegiatan operasional, perusahaan menambah aktiva tetapnya melalui kegiatan pembiayaan sewa guna usaha berupa satu unit peralatan Hidrolic Exavacator Komatsu PC-200-61 secara sewa guna usaha yang disewa dari PT Orix Indonesia Finance selaku *lessor*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlakuan akuntansi sewa guna usaha atas peralatan tersebut termasuk dalam kriteria capital lease, karena terdapat pemindahan kepemilikan, masa sewa lebih dari dua tahun, perusahaan mempunyai hak opsi pembelian pada akhir masa sewa, dan jumlah pembayaran berkala ditambah nilai sisa menutupi harga perolehan aktiva sewa guna usaha dan keuntungan *lessor*. Perlakuan sebagai capital lease ini sudah sesuai dengan PSAK No.30. Akan tetapi dalam pencatatan transaksi sewa guna usaha oleh perusahaan menunjukkan adanya kesalahan pencatatan dan pengelompokan perkiraan. Hal ini akan mempengaruhi terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan karena terdapat pos-pos yang *overstated* dan *understated* pada periode tertentu, oleh sebab itu diperlukan jurnal penyesuaian untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Hasil dari evaluasi diatas adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar, sehingga informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ria Dwiyanti Samudra dengan penelitian ini yaitu keduanya melakukan penelitian dari pihak penyewa (*lessee*) dan jenis sewa yang digunakan yaitu sewa guna usaha pembiayaan (*Capital Lease*). Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai pengaruh perlakuan akuntansi *leasing* pada pelaporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan serta perusahaan yang menjadi objek penelitian.

METODE PENELITIAN

A. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Berdasarkan topik penelitian yang dibahas, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan PSAK No. 30 tentang Akuntansi *Leasing* Aktiva Tetap.

2. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan data kuantitatif untuk kepentingan analisis yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari dokumentasi dan wawancara. Tujuannya adalah untuk membuat suatu

deskripsi mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian tertentu, sehingga tidak perlu untuk mencari atau mengembangkan keterkaitan antar variabel atau menguji hipotesis.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait mengenai transaksi *leasing* aktiva tetap selama periode *leasing*, kemudian data tersebut dianalisis secara kuantitatif yang berusaha menganalisis bagaimana penerapan akuntansi *leasing* aktiva tetap pada PT Bumi Sarana Beton.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari PT Bumi Sarana Beton terdiri dari :

a) Aktiva Tetap

Berikut ini jenis aktiva tetap yang digunakan oleh PT Bumi Sarana Beton, dikelompokkan sebagai berikut:

1) Tanah

2) Bangunan

3) Alat Berat terbagi 2 yaitu :

a. Alat berat antara lain: *Concrete Pump, Concrete portable, Tuck Mixer, Dumptruck 10 Roda, Dumptruck 6 Roda, Truck Tangki Air, Truck Plate Bed, Whell Loader, Excavator, Molen Manual, Alat Laboratorium Beton MBT*

b. Mesin antara lain: *Batching Plant, Stone Crusher, Scalving, Pabrik Precast Pagar Beton, Pabrik Paving Stone, Pabrik Bata Ringan*

4) Kendaraan terbagai 2 yaitu: Mobil dan Motor

5) Inventaris Kantor terdiri dari:

a. Mebel dan peralatan dari kayu dan logam yang terdiri dari meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya.

b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, dan scanner dan sejenisnya

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifer, tape/cassette, video recorder, dan televisi

d. Alat dapur untuk memasak

e. *Dies, Jigs, dan mould*

f. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile,, telepon seluler dan sejenisnya

g. Alat pengatur udara udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya

b) Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha)

PT Bumi Sarana Beton memiliki beberapa jenis aktiva tetap, diantaranya ada uang diperoleh melalui kepemilikan langsung atau dengan membeli secara tunai dan adapula yang diperoleh dengan cara *leasing* (sewa guna usaha). Dalam usaha untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional

perusahaan, maka perusahaan bermaksud menambah aktiva tetapnya melalui sumber pembebanan dalam bentuk *leasing* (sewa guna usaha) dengan jalan membeli aktiva secara sewa guna usaha dari pihak *lessor*. Diharapkan dengan penambahan aktiva tetap tersebut perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan optimal.

Terdapat 2 jenis aktiva tetap yang oleh PT Bumi Sarana Beton beberapa unit diantaranya diperoleh dengan cara *leasing* yaitu jenis aktiva tetap kendaraan dan alat berat. Untuk jenis aktiva tetap kendaraan perusahaan memilih melakukan transaksi *leasing* dengan metode *operational lease* yakni tidak terjadi perpindahan kepemilikan aktiva tetap setelah masa sewa berakhir. Sedangkan untuk jenis alat berat perusahaan memilih melakukan transaksi *leasing* dengan metode *capital lease* yakni dengan adanya opsi pembelian dan perpindahan hak kepemilikan aktiva tetap dari *lessor* kepada *lessee* setelah masa sewa berakhir. Metode *leasing* yang dipilih perusahaan merupakan kebijakan perusahaan setelah mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan kelangsungan kegiatan perusahaan.

Untuk memberikan batasan terhadap jenis aktiva tetap yang akan dianalisis penerapan transaksinya berdasarkan PSAK, maka peneliti memutuskan memilih aktiva tetap berupa alat berat. Alat berat yang dimaksud yaitu 1 unit Mobil Hino FM260J M yang masa sewanya baru saja berakhir pada tahun 2013. Berikut ini ketentuan mengenai perjanjian sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT Bumi Sarana Beton selaku *lessee* dan PT Kumala Motor Sejahtera Hino Makassar selaku *lessor* yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2011, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jenis aktiva yang disewa guna usaha adalah sebuah kendaraan berupa 1 unit Mobil Hino FM260J M dengan harga perolehan sebesar Rp979.000.000
- 2) Masa sewa guna usaha mempunyai jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan yaitu dimulai dari April 2011 sampe dengan maret 2014. Besarnya angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 24.373.021.
- 3) Besarnya uang jaminan (uang muka) sebagai opsi pembelian *lessee* akan membeli kendaraan yang disewa guna usaha adalah sebesar Rp244.750.000
- 4) Penyusutan atas kendaraan yang disewa usaha dengan dasar garis lurus dengan umur ekonomis 8 tahun dengan nilai sisa sebesar Rp.50.000.000.
- 5) Suku bunga yang disepakati dalam perjanjian ini yaitu suku bunga flat sebesar 6,5 % perbulannya.
- 6) Pada awal perjanjian sewa guna usaha perusahaan mengeluarkan beban-beban dalam mengadakan kerjasama dengan pihak *lessor* diantaranya adalah beban provisi sebesar 0,5% dari total sisa hutang pokok, beban asuransi + premi, serta beban administrasi + notaries. Biaya-biaya tersebut diakui dan dibebankan pada saat terjadinya

transaksi yaitu pada awal masa sewa guna usaha dan termasuk dalam beban lain – lain.

Berdasarkan penjelasan perjanjian sewa guna usaha diatas, *lessee* dibebani hutang oleh *lessor* sebesar Rp 877.428.750 dengan rincian sebagai berikut:

Harga kendaraan	:Rp 979.000.000
Uang Muka	:Rp (244.750.000)
Sisa Hutang	:Rp 734.250.000
Suku bunga (flat) 6,5% x 36 bulan	:Rp 143.178.750
Total Bayar Angsuran Sewa	:Rp 877.428.750

Dari penjelasan perjanjian tersebut dapat pula diketahui bahwa perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh perusahaan tergolong dalam *capital lease*, hal ini karena berdasarkan beberapa syarat yang terdapat dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan PSAK No.30 yaitu sebagai berikut:

- Penyewa guna usaha (*lessee*) memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
- Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh *lessee* ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (*full payout lease*).
- Sedangkan untuk masa sewa guna usaha sama atau melebihi 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva yang dileasingkan, masa sewa guna usaha atas aktiva adalah 3 tahun, sedangkan umur ekonomis aktiva adalah 8 tahun, berarti untuk syarat ini tidak terpenuhi.

Berikut ini adalah deskripsi perlakuan akuntansi sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT Bumi Sarana Beton, pencatatan transaksi yang dilakukan oleh PT Bumi Sarana Beton selaku *lessee* adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/04/11	Alat Berat Sewa Pembiayaan Bank Utang sewa pembiayaan (mencatat perolehan alat berat)		979.000.000	244.750.000 734.250.000
	Asuransi dibayar dimuka Beban provisi Beban Administrasi Bank		38.212.000 3.671.250 1.350.000	43.233.250
31/12/11	Utang Sewa Pembiayaan		164.396.371	

	Beban Bunga Bank (mencatat pembayaran angsuran)		54.960.817	219.357.189
	Beban penyusutan alat berat sewa pembiayaan Akumulasi penyusutan alat berat sewa pembiayaan (mencatat penyusutan alat berat)		87.093.750	87.093.750
31/12/12	Utang Sewa Pembiayaan Beban Bunga Bank (mencatat pembayaran angsuran)		233.422.352 59.053.900	292.476.252
	Beban penyusutan alat berat sewa pembiayaan Akumulasi penyusutan alat berat sewa pembiayaan (mencatat penyusutan alat berat)		116.125.000	116.125.000
31/12/13	Utang Sewa Pembiayaan Beban Bunga Bank (mencatat pembayaran angsuran)		264.832.366 27.643.886	292.476.252
	Beban penyusutan alat berat sewa pembiayaan Akumulasi penyusutan alat berat sewa pembiayaan (mencatat penyusutan alat berat)		116.125.000	116.125.000
31/12/14	Utang Sewa Pembiayaan Beban Bunga Bank (mencatat pembayaran angsuran)		71.599.271 1.519.792	73.119.063
	Beban penyusutan alat berat sewa pembiayaan Akumulasi penyusutan alat berat sewa pembiayaan (mencatat penyusutan alat berat)		29.031.250	29.031.250

a. Pencatatan Perolehan Aktiva Tetap

Dalam metode *capital lease*, *lessee* memperlakukan transaksi *lease* seolah-olah aktiva tetap telah dibeli dalam transaksi pembiayaan, aktiva diperoleh dan kewajiban diakui. Oleh karena itu, *lessee* mencatat transaksi sewa pembiayaan sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada

nilai terendah antara nilai sekarang dari pembayaran *lease* minimum (tidak termasuk biaya-biaya lain yang berkaitan dengan aktiva) atau nilai pasar wajar aktiva yang di*lease* pada awal *lease*. Dasar pemikiran untuk pendekatan ini adalah bahwa aktiva yang di*lease* tidak boleh dicatat lebih tinggi dari nilai pasar wajarnya.

Dengan menggunakan metode *capital lease*, maka perusahaan akan mencatat perolehan alat berat sebagai aktiva tetap yang selanjutnya akan diamortisasi selama umur ekonomisnya. Dalam penyajian aktiva sewa guna usaha perusahaan telah menjurnal perolehan alat berat yang disewa guna usaha sebagai kelompok aktiva tetap dengan memisahkan antara aktiva tetap lain yang bukan aktiva sewa guna usaha, tetapi pemisahan aktiva tetap tersebut tidak dicantumkan pada laporan neraca melainkan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK No.30 paragraf 7.1.1 tentang perlakuan akuntansi sewa guna usaha dinyatakan sebagai berikut, aktiva tetap yang disewa guna usahakan dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok tersendiri, kewajiban sewa pembiayaan yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. Perlakuan akuntansi tersebut telah diterapkan pada pencatatan transaksi sewa pembiayaan oleh PT Bumi Sarana Beton.

b. Pencatatan Akuntansi Depresiasi Aktiva Sewa Guna Usaha

Seperti yang telah dijelaskan pada teori-teori sebelumnya bahwa aktiva tetap seperti alat berat, mesin, kendaraan, dan sebagainya kecuali tanah mempunyai umur ekonomis yang terbatas dan memberikan manfaat untuk beberapa periode akuntansi saja. Aktiva tetap mengalami penurunan nilai dan setiap tahun dialokasikan sebagai beban berdasarkan umur ekonomis yang diestimasikan, sesuai dengan PSAK No. 30 paragraf 5 dinyatakan sebagai berikut:

Aktiva yang disewa guna usaha harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Perusahaan telah menggunakan metode garis lurus dalam menentukan beban depresiasi atas alat berat dan umur ekonomisnya selama 8 tahun. Dalam pencatatan akumulasi depresiasi alat berat, perusahaan mendebit beban depresiasi alat berat dan mengkreditkan akumulasi depresiasi alat berat dengan memisahkan antara alat berat sewa guna usaha dan alat berat bukan sewa guna usaha. Hal ini sudah tepat, dengan mencatat alat berat tersebut dalam perkiraan tersendiri pada kelompok aktiva tetap sewa guna usaha dan bukan kelompok aktiva tetap.

Berikut adalah perhitungan penyusutan alat berat PT Bumi Sarana Beton dengan menggunakan metode garis lurus dengan nilai sisa Rp 50.000.000 dengan umur ekonomis 8 tahun:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}-\text{Nilai sisa}}{\text{Umur Ekonomis}} \\ &= \frac{979.000.000-50.000.000}{8} \\ &= 116.125.000 \text{ pertahun} \end{aligned}$$

c. Pencatatan Utang Sewa Guna Usaha

Aktiva yang diperoleh dengan cara *lease* diakui seolah-olah aktiva tersebut telah dibeli melalui sewa pembiayaan, sehingga pencatatan yang terjadi yaitu aktiva tetap sewa pembiayaan bertambah disisi debit yang diperoleh dengan cara pembiayaan yang diakui sebagai utang sewa pembiayaan yang dicatat disisi kredit oleh PT Bumi Sarana Beton.

d. Pencatatan Beban-beban

Sebagaiman aktiva tetap lainnya, aktiva tetap yang disea guna usaha juga membutuhkan asuransi, pemeliharaan, dan pajak. Beban-beban tersebut disebut biaya *executory* selama umur ekonomis aktiva tetap. Namun disini PT Bumi Sarana Beton menyatakan bahwa biaya *executory* tersebut digolongkan dan diakui kedalam akun yang berbeda, untuk asuransi alat berat tersebut perusahaan telah membayarkan secara penuh sehingga transaksi diakui dan dicatat sebagai asuransi dibayar dimuka. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan pajak diakui sebagai beban disetiap terjadi pembayaran selama umur ekonomis aktiva tetap. Sedangkan beban bunga dicatat bersamaan dengan pembayaran utang sewa pembiayaan.

Dari jurnal diatas maka dapat dibuatkan ringkasan transaksi berupa buku besar untuk masing-masing akun terkait sebagai berikut:

Alat berat sewa pembiayaan

12/04/11	979.000.000	
----------	-------------	--

Asuransi dibayar dimuka

12/04/11	38.212.000	
----------	------------	--

Bank

12/04/11		244.750.000
12/04/11		43.233.250
31/12/11		219.357.189
31/12/12		292.476.252
31/12/13		292.476.252
13/03/14		<u>73.119.063</u>
Saldo	1.165.412.006	

Akumulasi penyusutan Alat berat sewa pembiayaan

31/12/11		87.093.750
31/12/12		161.125.000
31/12/13		161.125.000
13/03/14		<u>29.031.250</u>
Saldo		348.375.000

Utang Sewa Pembiayaan

12/04/11		734.250.000
31/12/11		164.396.371
31/12/12		233.422.352

31/12/13	264.832.366
13/03/14	<u>71.599.271</u>
734.250.000	<u>734.250.000</u>
Saldo	0
Beban Provisi	
12/04/11	3.671.250
Beban Administrasi	
12/04/11	1.350.000
Beban Bunga	
12/04/11	143.178.750
31/12/11	54.960.817
31/12/12	59.053.900
31/12/13	27.643.886
13/03/14	<u>1.519.792</u>
143.178.750	<u>143.178.750</u>
Saldo	0
Beban penyusutan Alat berat sewa pembiayaan	
31/12/11	87.093.750
31/12/12	161.125.000
31/12/13	161.125.000
13/03/14	<u>29.031.250</u>
Saldo	348.375.000

Dari pembahasan di atas, maka dapat dibuat matriks perbandingan antara teori yang sudah ada dan pelaksanaannya di PT Bumi Sarana Beton sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
Berdasarkan pengalihan risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan	a. Sewa mengalihkan kepemilikan asset kepada <i>lessee</i> pada akhir masa sewa.	✓	
	b. Sewa mengandung opsi pembelian asset.	✓	
	c. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis asset.		✓
	d. Nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum (tidak termasuk biaya pelaksanaan) secara substansial mendekati nilai wajar asset sewaan.	✓	
	e. Aset sewaan bersifat khusus sehingga hanya <i>lessee</i> yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.		✓
Berdasarkan indikator sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan	a. Jika <i>lessee</i> dapat membatalkan sewa, maka rugi <i>lessor</i> yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh <i>lessee</i> .	✓	
	b. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar nilai residu dibebankan kepada <i>lessee</i> ;	✓	

	c. Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental.	✓	
Berdasarkan perlakuan akuntansi	a. Asset sewaan diperlakukan seolah-olah aset itu telah dijual kepada lessee sehingga aset dicatat aset tetap dalam pembukuan lessee. b. Fasilitas pembiayaan terkait dicatat sebagai liabilitas (utang sewa) dalam pembukuaan lessee, dan sebagai aset (piutang sewa) dalam pembukuan lessor. c. Pembayaran sewa berkala dihitung agar mencakup beban/pendapatan keuangan dan pelunasan kewajiban.	✓ ✓ ✓	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerapan akuntansi leasing aktiva tetap pada PT Bumi Sarana Beton belum secara keseluruhan memenuhi kriteria yang diatur oleh PSAK No. 30 yaitu PT Bumi Sarana Beton tidak memenuhi kriteria indikator masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aktiva tetap dan indikator aset sewaan bersifat khusus sehingga hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.

Berikut perhitungan hasil penelitian dengan menggunakan rumus IKK seperti yang dikemukakan Arikunto :

$$IKK = \frac{9}{11} = 0,82 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai sebesar 82% yang berdasarkan tingkat persentase yang telah dikemukakan oleh Arikunto 76-100% dikalsifikasikan dalam kualifikasi “sesuai”, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi leasing pada PT Bumi Sarana Beton sudah sesuai dengan PSAK No. 30. Namun, penerapan PSAK No. 30 belum mencapai tingkat kesesuaian 100% yakni terdapat beberapa perbedaan yaitu PT Bumi Sarana Beton tidak memenuhi kriteria indikator masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis asset, PSAK No. 30 mensyaratkan masa sewa guna usaha adalah sama atau melebihi 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva tetap, sedangkan masa sewa guna usaha untuk alat berat tersebut adalah 3 tahun dengan umur ekonomis 8 tahun. Ini berarti masa sewa hanya 37,5% dari taksiran umur ekonomis alat berat.

Kemudian untuk indikator aset sewaan bersifat khusus sehingga hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material, indikator ini pun tidak terpenuhi karena untuk jenis aktiva tetap yang menjadi objek penelitian perusahaan menyewakan kembali alat berat tersebut kepada perusahaan lain, dalam hal ini PT Bumi Sarana Beton bertindak selaku lessor dengan menggunakan metode *operating lease* yang didalamnya perusahaan menanggung biaya pemeliharaan alat berat selama masa sewa yang berarti terdapat modifikasi secara material terhadap aktiva tetap.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan PSAK No. 30 tentang akuntansi *leasing* aktiva tetap pada PT Bumi Sarana Beton, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT Bumi Sarana Beton atas aktiva tetap yang diperoleh melalui kegiatan pembiayaan sewa guna usaha adalah dengan menggunakan metode *capital lease* dan didepresiasi dengan metode garis lurus.
2. Saat memperoleh alat berat pada awal masa sewa guna usaha dalam penyajiannya dineraca, perusahaan memasukkan perkiraan alat berat pada kelompok aktiva tetap dengan memisahkan dalam perkiraan tersendiri dengan aktiva tetap lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PSAK No. 30 dan memberikan gambaran yang jelas mengenai aktiva sewa guna usaha.
3. Pencatatan atas kewajiban yang berkaitan dengan transaksi sewa guna usaha telah dipisahkan oleh perusahaan antara kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dengan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban sewa guna usaha yang dicatat setiap periode adalah sama yang dihitung dari selisih antara pembayaran angsuran dikurangi bunga.
4. Dari hasil perhitungan Indeks Kesesuaian Kasar didapatkan nilai sebesar 82%, artinya bahwa penerapan PSAK No. 30 pada transaksi *leasing* aktiva tetap pada PT Bumi Sarana Beton telah sesuai berdasarkan tabel tingkat kesesuaian dengan rentang 76%-100%.
5. Penerapan PSAK No. 30 belum mencapai tingkat kesesuaian 100% dengan terdapatnya beberapa kriteria yang belum terpenuhi, indikator masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis yakni 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva tetap sedangkan masa sewa yang diterapkan PT Bumi Sarana Beton adalah 37,5% dari taksiran umur ekonomis aktiva. kemudian indikator aset sewaan bersifat khusus sehingga hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material disini PT Bumi Sarana Beton menyewakan kembali alat berat tersebut kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Dyckman, Thomas R., Dukes, Roland E., dan Davis, Charles J. 2001. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2000. *Akuntansi Aktiva Tetap, Akuntansi Pajak, Revaluasi, Leasing*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [Id.m.wikipedia.org/wiki/sewa_guna_usaha](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sewa_guna_usaha). Diakses pada tanggal 4 Agustus 2014

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kieso, Donald. E, Weygandt, Jery J., dan Warfield, Terry D. 2002. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Samudra, Ria Dwiyanti. 2008. *Penerapan PSAK No.30 Mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap dan Pengaruhnya pada Neraca dan Laporan Laba Rugi Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Nusantara)*. Skripsi. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.